

STRATEGI HUMAS KEPOLISIANDALAM MENINGKATKAN CITRA POLISI(Studi pada Humas Polresta Pasuruan)

 Oleh: H. M. GHULAM ROSUL (03220234)

Communication Science

Dibuat: 2009-04-02 , dengan 2 file(s).

Keywords: Strategi humas, citra polisi

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi pemerintah yang salah satu fungsinya adalah sebagai pelindung dan penganyom masyarakat Indonesia. Peran polisi sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polri dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut profesionalitas dan figuritas oknum Polri atau polisi harus lebih ditingkatkan demi menjaga baik nama Polisi di mata masyarakat.

Mengingat banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih menstabilkan kondisi Bangsa Indonesia dalam berbagai masalah pelanggaran hukum seperti pembasmian terorisme, penangkapan para koruptor, serta peningkatan keamanan masyarakat yang merupakan bagian penting dari platform politik adalah bentuk tanggungjawab, Polisi untuk pemerintah yang harus diemban dengan baik. Sesungguhnya permasalahan penegakan hukum bukanlah hal baru bagi polisi, karena selama ini polisi telah berusaha menjalankan fungsinya secara maksimal. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat tentang masalah penegakan hukum. Tanpa adanya bentuk kerjasama dari keduanya persoalan penegakan hukum menjadi lebih sulit teratasi, karena itu diperlukan adanya rasa saling mempercayai diantara dua pihak, baik dari Polisi maupun masyarakat sekitar.

Namun tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi semakin lama semakin berkurang disebabkan adanya persepsi negatif masyarakat pada tubuh polisi. Citra baik polisi di mata masyarakat seringkali dikotori oleh ulah oknumnya sendiri sehingga polisi didera vonis yang negatif. Seringkali masyarakat mengeneralisasikan masalah yang ada, kesalahan salah satu oknum polisi merupakan kesalahan dalam tubuh organisasinya pula. Beberapa kasus yang seringkali menjadi masalah adalah kasus penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, pelecehan seksual, perbuatan tidak menyenangkan, dan penyalahgunaan senjata api. Kasus tersebut perlahan-lahan membentuk sebuah opini negatif dan sikap tidak percaya dalam masyarakat, karena opini yang seharusnya terbentuk adalah polisi merupakan sebuah figur yang patut untuk dicontoh dan diandalkan, karena kekuatan polisi merupakan pilar utama dalam masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam menjalankan fungsinya seringkali publik atau masyarakat meragukan kemampuan polisi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penganyom yang dapat dipercaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi humas Polresta Pasuruan dalam pemulihan citra polisi di mata masyarakat dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemulihan citra Polisi.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti berusaha mendiskripsikan (menggambarkan) dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, yaitu pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Sumber informasi atau informan dalam penelitian ini di antaranya adalah Kapolresta Pasuruan, Humas Polresta Pasuruan.

Strategi Kepolisian yang digunakan dalam rangka meningkatkan citra positif pada Polresta Pasuruan adalah transparansi komunikasi yang terdiri dari pendekatan kepada masyarakat. Program Polmas dan hubungan personal yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memasang pamflet, siaran radio dan lain-lain, memberikan pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan kepolisian dengan masyarakat adalah dengan FKPM melalui binluh dan kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaannya oleh jajaran Babinkamtibmas yang selalu mendampingi masyarakat di tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan untuk Polresta adalah dengan Patroli yang dilakukan. Polisi harus dapat menampilkan figur yang memasyarakat sehingga masyarakat tidak memandang polisi sebagai lembaga militer yang otoriter dan menakutkan. Selama ini seolah masih ada jarak sosial antara polisi dan masyarakat. Akibatnya, banyak pekerjaan polisi yang semestinya bisa diselesaikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, namun masyarakat kurang memberikan informasi secara lengkap.

Untuk itu, polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap menangani persoalan kamtibmas. Sikap angkuh dan anarkis yang sering ditampilkan dalam menyelesaikan persoalan harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, penyelesaian persoalan kamtibmas dengan pedoman menghargai hak asasi manusia (HAM) perlu dikedepankan. Melalui cara demikian, otomatis kedekatan Polri dan masyarakat dapat tercipta. Selanjutnya, citra Polri di mata publik pun akan dapat terwujud dengan sendirinya.

Faktor penghambat dalam pemulihan citra polisi adalah di mata masyarakat adalah dari dalam tubuh Polisi sendiri. Dimana citra polisi di mata masyarakat mengalami pasang surut. Pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi, ternyata sering dirusak oleh ulah oknumnya sendiri sehingga polisi didera vonis yang negatif. Untuk itu perlu adanya pengawasan melekat terhadap seluruh anggota baik itu jajaran bintangara, perwira menengah maupun perwira tinggi sehingga tercipta suatu profesionalitas kepolisian republik Indonesia.

ABSTRACT

Republic of Indonesia Police (Police) be organization of government that is one of its(the function is as Indonesia public protector. Police duty increasingly heavy in executing its(the function remembers collisions of law handled by Polri from time to time increasingly increases. In the condition profesionality and police figurity have to be more be improved for the shake of taking care of police image in public eye.

Remembers existence of commitment of government to improve; repair condition of nation Indonesia in so many transgression problem like eradication of terrorism, arrest of the corruptors, and improvement of security and safety of public, which is essential part of politics platform that is automatic as is form of responsibility. Police as aparatur government which diemban must carefully. In fact problems straightening of law is not new thing for police, because till now police has tried implements its(the function maximumly. Expected good cooperation between polices and public about problem straightening of law. Without existence of form of cooperation from both problem straightening of law becomes more difficult to be overcome, in consequence is required existence of taste is each other trust between two party(sides, either from Police and also public around.

This research internal issue formula is how liaison strategy Polresta Pasuruan in increasing police image in public eye and what becoming resistor factor in increasing image Police.

This research done with descriptive research type. Researcher tries description (depicts) and menginterpretasikan condition or the relation of the, that is opinion is being growing, process is

being taking place, effect is being happened or tendency is being growing. Information Source or informan in this research among others is Kabag Binamitra, member of Binamitra Polresta Pasuruan.

Police strategy applied for the agenda of increasing positive image at Polresta Pasuruan is communications transparency consisted of by approach to public. Program Polmas and the relation of personal done variously for example with installing pamphlet, radio broadcast and others, gives approach to public by the way of giving counselling to public. Approach of police with public is with FKPM through binluh and visit to public figures. Its(the execution by the line of Babinkamtibmas the always consorts public in level of sub-district or countryside. While for Polresta is with Patroli done. Police hams can present figure that is applied in social activities so that public doesn't look into police as fearful and autoritary military institute. Till now likely there are still social distance between polices and public. As a result, many works of police which its(the semesti can be finalized by entangling participation of public, but public unable to give information in complete.

Police must place forward approach of humanist in every handling problem kamtibmas. Proud bearing and anarchic often presented in finalizing problem of hams soon is stopped. Instead, solving of problem of kamtibmas with guidance esteems human right (HAM) need to be placed forward. Pass way that way, automatically contiguity of Polri and public can be created.

Hereinafter, image Poiri in public mats also will be able to be realized by itself.

Resistor factor in increasing police image is in public eye is from within body Police x'self.

Where police image in public eye experiences ebb. Positive imagery built as commitment towards police professionalism, simply often destroyed by act of his own oknum so that police is castigated [by] negative adjudging For the purpose needs existence of observation to stick to all good member of that is the line of petty officer, middle office and also top brass causing is created a republic of Indonesia police profesionality.